



## Analisis Politik Dinasti Jokowi dalam Lensa Patologi Birokrasi: *Grand Corruption*

Shyfana Saskia Aulia<sup>1</sup>, Salsabilla<sup>2</sup>, Fayza Arisanda Pitakon<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Fakultas Administrasi, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received November 25, 2023  
Revised November 28, 2023  
Accepted Desember 6, 2023

#### Kata Kunci:

Politik Dinasti, Patologi  
Birokrasi, *Grand Corruption*,  
Demokrasi

#### Keywords:

*Dynasty Politics, Bureaucratic  
Pathology, Grand Corruption,  
Democracy*

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang politik dinasti Jokowi dalam lensa patologi birokrasi melalui sudut pandang *grand corruption*. Latar belakang dari pembahasan terkait dengan politik dinasti Jokowi dalam penelitian ini adalah karena adanya kontestasi politik pada keluarga Jokowi. Hadirnya istilah politik dinasti Jokowi dimulai ketika anak dan menantunya mencalonkan diri sebagai Wali Kota, kemudian disusul oleh Gibran Rakabuming Raka yang mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden bersama Prabowo, dan Kaesang yang menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Politik dinasti yang terjadi pada era kepemimpinan Presiden Jokowi adalah berupa perubahan keputusan Mahkamah Konstitusi untuk memberi akses kemudahan bagi putranya, Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi calon wakil presiden. Hal ini sudah termasuk ke dalam *grand corruption* di mana penyelewengan dalam menggunakan wewenang kekuasaan untuk mengubah keputusan yang telah ada. Dalam demokrasi yang sehat, menurut Eep Saefullah Fatah selaku Pengamat dan Konsultan Politik mengatakan bahwa proses politik yang sehat terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu seleksi, *election*, dan *delivery*. Ketika ketiga proses tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka dapat dikatakan adanya praktik membangun politik dinasti. Adanya politik dinasti yang tidak sesuai dengan konsep negara demokrasi, dapat mengancam sistem demokrasi negara Indonesia dan akan menimbulkan praktik KKN (Kolusi, Korupsi, Nepotisme).

### ABSTRACT

*The aim of this research is to find out about the politics of the Jokowi dynasty through the lens of bureaucratic pathology through the perspective of grand corruption. The background to the discussion regarding Jokowi dynasty politics in this research is due to political contestation within the Jokowi family. The presence of the political term Jokowi dynasty began when his son and son-in-law ran for Mayor, then followed by Gibran Rakabuming Raka who ran as vice presidential candidate alongside Prabowo, and Kaesang who became General Chair of the Indonesian Solidarity Party (PSI). The political dynasty that occurred during the era of President Jokowi's leadership was in the form of a change in the decision of the Constitutional Court to provide easy access for his son, Gibran Rakabuming Raka, to become a vice presidential candidate. This is included in major corruption, where there is misuse of authority to change existing decisions. In a healthy democracy, according to Eep Saefullah Fatah as a Political Observer and Consultant, a healthy political process is divided into three stages, namely selection, electoral and delivery. When this third process does not work as it should, it can be said that there is a practice of building a political dynasty. The existence of a political dynasty that is not in accordance with the country's concept of democracy can threaten the democratic system of Indonesia and will give rise to the practice of KKN (Collusion, Corruption, Nepotism).*

*This is an open access article under the [CC BY](#) license.*



***Corresponding Author:***

**Shyfana Saskia Aulia**

Fakultas Administrasi, Universitas Indonesia,  
Jakarta, Indonesia  
Email: shyfansa04@gmail.com

## **1. PENDAHULUAN**

Konsep dinasti berangkat dari negara yang berbentuk kerajaan. Dinasti politik telah muncul sejak lama dalam negara demokrasi. Pada masa reformasi, politik dinasti terus menerus terjadi. Hal yang sekarang ini menjadi sorotan masyarakat adalah terdapat kontestasi politik dalam sistem pemerintahan Jokowi. Dalam konteks politik modern, politik dinasti sering kali menjadi subjek perdebatan karena potensi pengaruh yang kuat terhadap sistem politik suatu negara. Fenomena ini menciptakan dampak yang beragam dan kontroversial bagi proses politik, perekonomian, serta tatanan sosial masyarakat.

Pertama-tama, dinasti politik Jokowi menggambarkan dominasi politik keluarga atau kelompok terdekat dalam kekuasaan. Jokowi, yang pertama kali terpilih sebagai Presiden Indonesia pada tahun 2014, kemudian terpilih lagi untuk masa jabatan kedua pada tahun 2019, telah menciptakan ciri-ciri politik dinasti melalui kehadiran keluarga dan orang-orang terdekatnya dalam lingkaran kekuasaannya. Hal tersebut disebabkan karena adanya keikutsertaan anak dan menantu Jokowi pada dunia perpolitikan Indonesia dan menduduki posisi atau jabatan yang strategis. Konsolidasi politik dinasti Jokowi ini terlihat mulai dari Pilkada tahun 2020, yaitu pencalonan Gibran Rakabuming Raka menjadi Wali Kota Solo dan Muhammad Bobby Afif Nasution Wali Kota Medan.

Regulasi yang tidak kuat menjadi salah satu faktor membangun politik dinasti dalam Pilkada. Adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 berkaitan dengan Pilkada memberikan upaya untuk membatasi politik dinasti dengan adanya larangan konflik kepentingan. Pada Pasal 7 poin q berisikan calon pemimpin daerah tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan petahana dan politisi yang lain. Dalam hal ini, calon pemimpin daerah tidak boleh terikat hubungan darah, perkawinan serta memiliki garis keturunan satu tingkat lurus ke bawah, atas, dan samping dengan petahana, terkecuali jika sudah melewati jeda satu kali masa jabatan. Tetapi dalam pelaksanaannya, justru keputusan tersebut dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUU-XIII/2015 karena putusan tersebut dianggap hanya bersifat politis dan asumptif, seolah-olah setiap calon yang terikat darah atau perkawinan dengan petahana otomatis akan menciptakan dinasti politik yang dapat merusak struktur bangsa tanpa mempertimbangkan apakah calon pemimpin tersebut mempunyai kompetensi dan integritas atau tidak.

Lalu disusul dengan putusan yang dibuat oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, yaitu Anwar Usman. Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung dari Joko Widodo resmi menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) bersama bakal calon presiden Prabowo Subianto. Terpilihnya Gibran menjadi cawapres menuai pandangan masyarakat terhadap

adanya dinasti politik pada masa pemerintahan presiden Jokowi. Terlebih lagi, Gibran dianggap tidak sesuai dan menyimpang dari aturan perundang-undangan yang berlaku. Gibran dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 169 huruf q tentang pemilu yang berisi batas minimum capres dan cawapres. Namun, Ketua MK justru merevisi isi Undang-Undang tersebut. Hal tersebut menuai polemik di masyarakat. Banyak yang kontra terhadap keputusan Ketua MK yang dianggap melanggar kode etik dan mencerminkan patologi birokrasi. Usut punya usut, Ketua MK tersebut merupakan adik ipar Presiden Jokowi yang mana merupakan paman dari Gibran Rakabuming Raka. Kemudian Kaesang menjadi Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) periode 2023-2028. Hal tersebut menyebabkan perubahan citra kepemimpinan presiden Jokowi yang selama ini melekat sebagai salah satu presiden yang tidak mengikutsertakan keluarganya dalam berpolitik.

Meskipun demokrasi tidak dapat membatasi partisipasi dalam kontestasi politik, realitas yang terjadi di lapangan membuktikan bahwa politik dinasti memiliki dampak yang negatif pada keberlanjutan demokrasi di Indonesia. Dengan begitu, banyak menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat bahwa demokrasi di Indonesia sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat karena perputaran politik yang terdapat di keluarga Jokowi hanya menguntungkan satu kelompok semata. Maka dari itu, untuk mengetahui apakah patologi birokrasi masih terdapat dalam sistem birokrasi Indonesia, apakah *grand corruption* menjadi salah satu patologi birokrasi yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo 2018-2023, dan apakah penggunaan kekuasaan untuk memberikan kekuasaan terhadap sanak keluarga menjadi dinasti politik yang terjadi pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi 2018-2023 peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang hal tersebut

## 2. METODE

Penelitian ini berfokus pada pembahasan politik dinasti yang terjadi di pemerintahan Jokowi. Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yaitu dengan mempelajari dan memahami teori-teori yang digunakan dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menghimpun data dari berbagai sumber literatur. Literatur yang peneliti jadikan objek penelitian tidak hanya sebatas pada buku-buku yang ada kaitannya dengan politik dinasti, tetapi juga melalui jurnal dan riset yang sudah pernah dilakukan, serta melalui opini-opini para ahli dan berita di media massa. Dari bahan studi pustaka yang diperoleh, peneliti melakukan analisis kritis yang mendalam untuk memvalidasi proposisi dan gagasan yang diusung.

### 2.1 Tinjauan Pustaka

#### 1. Patologi Birokrasi

Patologi birokrasi merupakan penyakit yang terdapat dalam sistem birokrasi atau dengan kata lain kesalahan yang dilakukan oleh suatu oknum secara terus menerus hingga menjadi budaya menyeleweng dalam sistem birokrasi. Pada praktiknya kini nihil menemukan sistem birokrasi yang bersih dari patologi, dengan kata lain kebersihan birokrasi menjadi suatu agenda yang harus menjadi urgensi bagi para pemimpin saat ini. Sebaliknya tidak ada birokrasi yang menderita “penyakit birokrasi sekaligus” [1]. Dalam paradigma Actonian menyatakan bahwa yang termasuk patologi birokrasi adalah *power tends to corrupt* atau menyelewengkan

kekuasaan untuk melakukan kejahatan dalam birokrasi [2]. Sesuai hal tersebut selain sistem birokrasi, patologi birokrasi juga dapat terjadi dalam aparturnya. Contoh kasus terkini adalah penyelewengan kekuasaan oleh Presiden Jokowi untuk mengubah batasan maksimal umur calon wakil presiden melalui keputusan MK yang diketahui adalah adik ipar Jokowi.

Hal tersebut menunjukkan kelemahan birokrasi yang disebutkan oleh Caiden, seorang pakar ternama reformasi administrasi, bahwa gejala seperti penyelewengan kekuasaan oleh para petinggi menggambarkan citra menyeluruh buruknya birokrasi di Indonesia [3].

## 2. Ruang Lingkup Patologi Birokrasi

Ruang lingkup patologi birokrasi terdapat 2 bagian [4] yaitu:

1. *Disfunctions of bureaucracy*, yakni berkaitan dengan struktur, tatanan dan susunan yang bermasalah dalam pelaksanaan birokrasi.
2. *Mal-administration*, yakni berkaitan dengan ketidakmampuan individu untuk berintegritas seper atau minimnya etika dari sumber daya manusia yang terdapat dalam birokrasi.

Ditinjau dari perspektif perilaku, patologi birokrasi merepresentasikan bahwa birokrasi sebagai pemegang kewenangan dalam jalannya pemerintahan memiliki peluang yang besar bagi sekelompok oknum tertentu untuk melakukan penyelewengan karena mudahnya akses untuk meraup banyak keuntungan.

## 3. Grand Corruption

Korupsi memiliki berbagai bentuk dan jenisnya. Mulai yang dilakukan dari tatanan terendah hingga tatanan tertinggi.

*Grand Corruption* merupakan salah satu bentuk korupsi berdasarkan dampaknya. *Grand Corruption* biasa disebut juga sebagai korupsi kelas atas yang dapat menyebabkan kerugian negara dengan jumlah yang sangat besar bahkan bisa mencapai triliunan rupiah. Di dalam Renstra 2011-2015, KPK menjelaskan kriteria *Grand Corruption*, yaitu:

1. Dapat melibatkan atau bahkan mengubah pengambilan keputusan dalam kebijakan atau regulasi
2. Melibatkan aparat penegak hukum
3. Memiliki dampak yang luas terhadap kepentingan nasional
4. Berlangsung secara terorganisir

## 4. Politik Dinasti

Politik dinasti merupakan kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok atau segelintir orang yang masih terikat kekerabatan atau terikat hubungan keluarga. Politik dinasti merupakan sebuah praktik pengalihan atau regenerasi kekuasaan kepada pihak tertentu, seperti keluarga elit, dengan tujuan untuk kepentingan memperoleh, mempertahankan, dan juga melanggengkan kekuasaan. Dalam sudut pandang politik tanah air, politik dinasti dianggap sebagai tantangan bagi semua elemen politik dikarenakan akan berdampak pada terciptanya kualitas pemerintahan yang rendah. Hal tersebut dapat terjadi karena citra dari politik dinasti cenderung memprioritaskan usaha untuk mempertahankan kekuasaan melalui cara yang tidak etis, seperti kekuasaan yang sedang berlangsung untuk memanfaatkan kekuasaan tersebut dalam memberikan ataupun membukakan jalan supaya kekuasaan bisa terus diturunkan secara turun-menurun tanpa melihat kapasitas politik, tanpa melihat integritas dan mengutamakan

kepentingan keluarga sendiri. Dasar prinsip politik dinasti, yaitu terletak pada hubungan sedarah, perkawinan, dan satu rumpun keluarga besar yang mempermudah jalan untuk mendapatkan posisi kekuasaan melalui pengalaman keluarga sebelumnya sehingga dalam kontestasi kekuasaan terbilang mudah karena ada sistem yang menggerakkan dan mendorong pewarisan jabatan secara turun menurun.

Dengan adanya politik dinasti membuat orang yang tidak memiliki kompetensi dapat meraih kekuasaan, sedangkan orang yang memiliki kompetensi menjadi tidak punya peluang untuk meraih kekuasaan karena bukan tergolong keluarga. Meskipun di Indonesia pemilihan pemimpin dilakukan melalui proses demokrasi, yang di mana pemilihan dilakukan oleh rakyat tetapi dengan kekuatan yang dimiliki oleh elit politik lama serta adanya dukungan oleh loyalitas dari pengikut dan adanya sumber kekayaan yang melimpah dapat memungkinkan pembentukan kekuasaan secara turun menurun dan menghapuskan nilai demokrasi. Politik dinasti dianggap tidak sejalan dengan prinsip demokrasi yang dalam hal ini rakyat memiliki peran dalam pemilihan para pemimpinnya.

Menurut Robert Endi Jaweng yang pada waktu itu merupakan Koordinator Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mengungkapkan bahwa terdapat tiga model politik dinasti. *Pertama*, model arisan keluarga, mencakup kekuasaan yang berputar pada satu keluarga atau adanya regenerasi kepemimpinan. *Kedua*, model lintas kamar dengan lintas cabang kekuasaan. Dalam model ini, misalnya terdapat seorang kakak yang menjabat sebagai Bupati di suatu wilayah, adiknya juga berperan sebagai ketua DPRD, dan anggota keluarga yang lainnya menduduki posisi jabatan strategis di daerah yang dipimpin oleh kakaknya. *Ketiga*, model lintas daerah. Pada model ini berarti setiap daerah dipimpin oleh satu keluarga yang sama. Dari penjabaran yang dilakukan oleh Robert Endi Jaweng dapat dilihat bahwa meskipun terdapat banyak model politik dinasti, tetapi intinya tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu melakukan praktik politik yang mengikutsertakan anggota keluarganya atau kerabatnya. Model yang relevan pada kasus politik dinasti Jokowi adalah model arisan keluarga dan model lintas daerah.

## 5. Demokrasi

Secara epistemologis demokrasi berasal dari kata “*demos*” yang berarti penduduk dan “*cratos*” yang berarti kekuasaan. Dapat disimpulkan secara harfiah *demos-cratos* adalah keadaannegara dengan sistem pemerintahan yang berprinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang semua rakyat atau warga negaranya ikut memerintah melalui perantara wakilnya. Selain itu, demokrasi juga merupakan pandangan hidup yang mendahulukan atau mementingkan persamaan hak dan kewajiban serta mendapatkan perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Menurut Eep Saefullah Fatah selaku Pengamat dan Konsultan Politik mengatakan bahwa dalam demokrasi, proses politik yang sehat terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu seleksi, *election*, dan *delivery*. Sahya Anggara [5] berpendapat melalui bukunya yang berjudul “Sistem Politik Indonesia” bahwa terdapat lima manfaat demokrasi, yaitu:

1. Kesetaraan sebagai warga negara

Pada prinsip ini, bukan hanya mengharuskan bahwa kepentingan setiap orang harus diperlakukan sama dan setara dalam kebijakan pemerintah, tetapi harus juga mendapatkan perlakuan yang sama terhadap perspektif setiap warga negara.

2. Memenuhi kebutuhan umum Pada negara demokratis, pemerintah memiliki potensi besar dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat biasa.
3. Pluralisme dan Kompromi  
Pada prinsip ini, perbedaan pendapat dan kepentingan diakui dalam proses demokrasi
4. Menjamin hak-hak dasar  
Pada sistem demokrasi, hak-hak dasar dijamin, termasuk adanya kebebasan berbicara, berpendapat, berekspresi, berserikat, bergerak, dan juga hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap keselamatansendiri
5. Pembaruan kehidupan sosial Mampu menghapus kebijakan yang telah rusak dan penggantian parapolitisi dengan cara yang damai.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik dinasti yang dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi mulai diketahui oleh masyarakat ketika Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak pertama dari Jokowi mencalonkan diri sebagai calon Wali Kota Solo. Tidak hanya itu, menantu Jokowi, yaitu Bobby Nasution pun ikut mencalonkan diri menjadi calon Wali Kota Medan. Gibran dan Bobby mulai menjabat di waktu yang bersamaan yaitu pada tahun 2021. Gibran yang pada awalnya seorang pengusaha dan tidak memiliki latar belakang politik mulai berkecimpungan di dunia politik saat ayahnya menjabat. Dengan cara memulai jabatannya di kota asalnya, yaitu Solo yang di mana pada awalnya Jokowi juga menjabat sebagai Wali Kota Solo. Tentunya masyarakat akan antusias dan memilih Gibran sebagai Wali Kota Solo karena dianggap sebagai keturunan dari Jokowi yang kinerjanya sudah tidak diragukan lagi. Jalan yang mulus untuk menjadi Wali Kota Solo dengan tidak memiliki *background* di dunia politik tentunya tidak lepas dari tangan Jokowi yang memiliki banyak relasi dengan petinggi partai khususnya PDIP. Dengan adanya modal atau jaringan sosial yang dimiliki oleh Jokowi tentunya digunakan untuk memenangkan kontestasi politik pada anak dan menantunya tersebut. Dilihat dari Kemenangan Bobby menjadi Wali Kota Medan dan Gibran menjadi Wali Kota Solo, menandakan bahwa pengaruh yang dihasilkan oleh modal atau jaringan sosial Jokowi mampu mendobrak terpilihnya Bobby dan Gibran. Dari pencalonan Bobby dan Gibran membuat masyarakat menganggap bahwa ada yang tidak beres dari kedua hal tersebut, tetapi pada saat itu masih belum terlalu teridentifikasi karena prosesnya masih berjalan sesuai dengan aturan demokrasi yang berlaku.

Namun, seiring dengan berjalannya waktu, politik dinasti yang dilakukan oleh keluarga Jokowi kian semakin menonjol. Politik dinasti model “arisan keluarga” kini terjadi ketika Gibran Rakabuming mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Sebenarnya tidak ada yang salah ketika Gibran ingin maju sebagai calon wakil presiden dan hal tersebut tidak dapat dikatakan politik dinasti jika mengikuti peraturan yang sesuai dengan sistem demokrasi. Tetapi, perlu diingat bahwa dalam demokrasi yang sehat, menurut Eep Saefullah Fatah selaku Pengamat dan Konsultan Politik mengatakan bahwa proses politik terbagi menjadi tiga tahapan: (1) Seleksi, dalam proses seleksi tentunya ada sistem meritokrasi, yaitu sistem politik yang memberikan kesempatan kepada siapapun untuk menjadi pemimpin dan memimpin berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. (2) *Election*, yang berarti langkah resmi dalam menentukan seseorang supaya dapat menduduki jabatan pemerintahan publik serta dapat menentukan penerimaan dan penolakan terhadap proposisi politik melalui pemungutan suara. (3) *Delivery*, yang ketika seseorang sudah terpilih menjadi pejabat publik

harus dapat menciptakan kebijakan-kebijakan ataupun mengambil langkah-langkah pemerintahan yang bertujuan untuk kepentingan semua orang, bukan hanya kepentingan pribadi atau bahkan kepentingan keluarga. Apabila dalam proses tersebut berjalan dengan sebagaimana mestinya, maka tidak dapat dikatakan politik dinasti. Tetapi, apabila dalam proses tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka dapat dikatakan sebagai praktik menuju politik dinasti. Seperti yang baru-baru ini terjadi, yaitu putusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Pasal 13 dalam PKPU Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 169 huruf q tentang pemilu, batas usia calon presiden dan calon wakil presiden adalah minimal 40 tahun. Pada awalnya, KPU sudah menyatakan bahwa tidak akan melakukan revisi atas pasal tersebut. Namun, ketika Gibran Rakabuming yang notabennya anak Presiden Jokowi mencalonkan diri sebagai cawapres dari Prabowo Subianto, KPU akhirnya merevisi pasal tersebut sesuai keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK). MK mengubah isi pasal tersebut menjadi “Syarat menjadi capres maupun cawapres adalah berusia minimal 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Hasil dari keputusan tersebut yang dapat membuat Gibran dapat tetap maju sebagai cawapres karena memenuhi syarat yaitu pernah atau sedang menjabat sebagai Wali Kota Solo walaupun usianya baru 36 tahun. Keputusan MK tersebut menuai banyak kontra dari masyarakat dan semakin diulik bahwa ketua MK yang menetapkan keputusan tersebut adalah Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi. Adanya putusan MK tersebut berarti sudah menciptakan kebijakan ataupun mengambil tindakan yang memanfaatkan kekuasaan dengan tujuan membantu dan mendukung keluarga untuk mendapatkan posisi yang istimewa. Dengan putusan yang dikeluarkan oleh ketua MK, dapat dinyatakan adanya upaya membangun politik dinasti karena sejatinya yang dapat disebut politik dinasti bukan hanya pada bagian eleksinya saja, tetapi pada proses seleksi dan *delivery*-nya juga.

Tidak selesai sampai di situ, pada tanggal 23 September 2023, Kaesang Pangarep resmi menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan dua hari setelah Kaesang bergabung, yaitu pada tanggal 25 September 2022, Kaesang Pangarep yang merupakan anak ketiga dari Jokowi telah menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) periode 2023-2028. Berbagai hal tersebut yang membuat masyarakat semakin yakin bahwa politik dinasti terdapat di pemerintahan era Jokowi karena banyak dari anggota keluarganya yang menduduki jabatan di pemerintahan. Melihat dari aksi yang dilakukan oleh Jokowi beserta keluarganya dapat kita simpulkan bahwa terdapat politik dinasti model “lintas daerah” dan model “arisan keluarga” sesuai yang dikatakan Robert Endi Jaweng. Politik dinasti yang dilakukan di era Jokowi ini tergolong sebagai patologi birokrasi yang salah satu contohnya adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perbuatan tersebut dianggap sebagai *grand corruption* di mana hukum negara dipermainkan dan dapat diubah demi kepentingan kelompok mereka saja. Hal ini tentunya akan menimbulkan kerugian yang besar terhadap masyarakat. Penggunaan *privilege* yang disalahgunakan oleh Ketua MK demi keponakannya sendiri. Penyakit terbesar di dalam birokrasi yaitu korupsi yang akan menimbulkan berbagai penyakit lainnya.

*Grand Corruption* yang terjadi pada era pemerintahan Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia dinilai menunjukkan bahwa birokrasi pada era ini menunjukkan indeks prestasi yang sangat buruk. Indonesia sebagai negara demokrasi tentunya memiliki beberapa nilai-nilai yang menjadi aspek indikator keberhasilan untuk menunjukkan keberhasilan pemerintahan Indonesia

di ranah global. Hal ini menjadi koreksi yang perlu diperhatikan bagi pemimpin selanjutnya untuk menghindari kejadian serupa agar tidak berkelanjutan dan memberantas bibit-bibit patologi birokrasi di Indonesia. Patologi birokrasi yang konon tak kunjung sembuh dari awal era demokrasi, nyatanya terus menerus menimbulkan kejadian baru dari era pemimpin satu ke pemimpin berikutnya. Kini setelah melakukan dinasti politik, rezim pemerintahan Jokowi dianggap buruk dan menimbulkan stigma negatif dari masyarakat. Kepercayaan masyarakat menjadi semakin rendah terhadap keadaan demokrasi di Indonesia. Kepercayaan masyarakat yang rendah dan tokoh publik yang tidak menjadi tokoh inspirasi masyarakat dapat menimbulkan masalah internal baru dan menghambat kemajuan negara Indonesia. Dinasti politik oleh keluarga Jokowi dapat menimbulkan efek negatif dan memberikan celah-celah bagi para perusak birokrasi untuk terus menimbulkan patologi birokrasi. Terlebih yang menjadi sorotan adalah kemudahan akses bagi ketua MK untuk mengubah hasil keputusan. Diharapkannya demi keberlangsungan birokrasi Indonesia yang bebas dari patologi kejadian seperti ini harus diberi sanksi yang tegas karena telah menyalahi tatanan aturan birokrasi dalam demokrasi.

Dampak politik dinasti di Indonesia menghadirkan pro dan kontra. Pihak yang pro terhadap politik dinasti mengatakan bahwa hadirnya anggota keluarga atau individu terdekat dalam politik dapat membawa kontinuitas dan juga stabilitas dalam kepemimpinan. Sedangkan pihak yang kontra terhadap politik dinasti berpendapat bahwa politik dinasti dapat meningkatkan resiko praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dengan adanya politik dinasti dapat menyebabkan rusaknya demokrasi, apalagi Indonesia merupakan negara demokrasi. Hal tersebut dapat menyebabkan kontrol terhadap kekuasaan menjadi lemah. Lemahnya kontrol kekuasaan akan terjadi ketika ada relasi-relasi kekerabatan atau kekeluargaan di dalam institusi politik karena dapat membukakan jalan untuk kerabat atau keluarganya supaya dapat menduduki jabatan tertentu. Hal ini dapat dilihat pada keputusan Ketua MK Anwar Usman, yang di mana membuat putusan tentang batas usia capres maupun cawapres. Dengan begitu, satu-satunya yang diuntungkan dalam putusan tersebut adalah keponakannya sendiri, yaitu Gibran yang menjadi cawapres mendampingi Prabowo pada pemilu 2024. Lalu pihak selanjutnya yang diuntungkan adalah Prabowo karena akan mendapatkan dukungan secara penuh dari Jokowi yang masih menjabat sebagai Presiden dan Jokowi memiliki sumber-sumber kekuasaan yang dapat mempengaruhi orang banyak dan tidak memberikan ruang serta peluang kepada orang yang lebih berkompetensi untuk memimpin karena peluang tersebut hanya akan ada di sekitar kerabat ataupun keluarganya. Sehingga demokrasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, politik dinasti merupakan ancaman bagi anak-anak miskin yang tidak bisa bersekolah, ancaman dari setiap buruh yang anaknya tidak bisa menjadi apa-apa karena menjadi korban kemiskinan struktural, ancaman bagi anak muda yang tidak punya akses, tidak punya *privilege*, tidak punya orang tua yang memiliki kekuasaan untuk membukakan jalan untuk maju sebagai pemimpin. Politik dinasti dapat menyebabkan semakin buruknya pertumbuhan ekonomi

#### 4. KESIMPULAN

Politik dinasti Jokowi telah menjadi topik kontroversial dan mendapat perhatian luas di Indonesia. Dalam konteks politik modern, dinasti politik sering kali menjadi subjek perdebatan karena potensi pengaruh yang kuat terhadap sistem politik suatu negara. Politik dinasti

merupakan kekuasaan politik yang dilaksanakan oleh sekelompok orang yang masih terikat kekerabatan atau terikat hubungan keluarga. Dengan kata lain, politik dinasti bisa disebut juga sebagai regenerasi kekuasaan kepada pihak-pihak yang turut andil dengan tujuan untuk mencapai kepentingan kelompoknya saja dan untuk mempertahankan kekuasaan. Hal tersebut termasuk ke dalam patologi birokrasi yaitu korupsi di mana pihak tersebut melakukan penyalahgunaan wewenang penyelenggara negara untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya. Korupsi tersebut dilakukan oleh pemegang kekuasaan untuk memberikan keuntungan pihak tertentu dan merusak public interest (kepentingan publik). Politik dinasti dianggap tidak sejalan dengan prinsip demokrasi yang dalam hal ini rakyat memiliki peran dalam pemilihan para pemimpinnya. Dengan adanya politik dinasti tentunya akan mengancam sistem demokrasi negara Indonesia dan akan dapat mempengaruhi proses politik yang sehat serta akan terjadi kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Contoh nyata dari adanya politik dinasti adalah pada masa Presiden Jokowi di mana keikutsertaan beberapa anggota keluarganya dalam dunia politik dan masing-masing memiliki jabatan yang sangat tinggi. Pengaruh politik dinasti mencakup proses pemilihan dan pengambilan keputusan yang kontroversial, seperti yang dilakukan oleh adik ipar Jokowi, yaitu merevisi aturan yang sangat menguntungkan keluarga Jokowi. Hal tersebut termasuk ke dalam *Grand Corruption*. Kehadiran yang kuat dari anggota keluarga atau individu terdekat dalam posisi politik utama dapat membentuk persepsi publik terhadap kesetaraan dan keadilan sosial. Terlebih lagi, hal ini juga bisa memengaruhi pola pikir masyarakat terhadap nilai-nilai demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

## REFERENSI

- [1] Teruna, Made. 2007, "Patologi Birokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- [2] Ismail, H.M. 2009, Politisasi Birokrasi, Malang: Ash-Shiddiqy Press.
- [3] Prasojo, Eko. 2010, Gayus dan Patologi Birokrasi, Jakarta: Kompas
- [4] Andang Ismail. 2009. Education Games Menjadi Cerdas dan Ceria dengan Permainan Edukatif. Yogyakarta : Pilar Media.
- [5] Anggara, S. (2013). *Sistem politik Indonesia*. Pustaka Setia.  
<https://etheses.uinsgd.ac.id/11047/1/11.%20Buku%20Sistem%20Politik%20Indonesia.pdf>